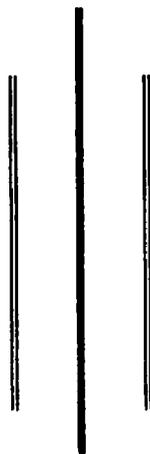




NOTA KEUANGAN

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2005**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	Umum	1
	Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Perhitungan APBD 2005	9
	Landasan Hukum Penyusunan Nota Perhitungan APBD 2005	10
	Sistematika Penulisan Nota Perhitungan APBD 2005	15
BAB II	REALISASI PENDAPATAN DAERAH	
	Realisasi Pendapatan Daerah	16
	Pendapatan Asli Daerah	17
	1. Pajak Daerah	18
	2. Retribusi Daerah	22
	3. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	34
	4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	36
	Dana Perimbangan	38
	Lain-Lain Penerimaan Yang Sah	40
BAB III	REALISASI BELANJA DAERAH	
	Realisasi Belanja Daerah	41
	Belanja Aparatur Daerah	42
	Belanja Pelayanan Publik	44
BAB IV	REALISASI PEMBIAYAAN	46
BAB V	PENUTUP	48

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2005	17
Tabel 2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005	17
Tabel 3	Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2005	39
Tabel 4	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2005	41
Tabel 5	Realisasi Belanja Aparatur Daerah	42
Tabel 6	Realisasi Belanja Pelayanan Publik	44
Tabel 7	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2005	46

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Realisasi Pelaksanaan APBD 2005	7
----------	---------------------------------------	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Dalam kurun waktu 3 tahun ini, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah paket perundang-undangan tentang sistem dan mekanisme keuangan. Dampak dari perundang-undangan tersebut mengakibatkan sejumlah sistem dan mekanisme keuangan daerah mengalami perubahan yang cukup besar. Termasuk didalamnya adalah mekanisme didalam pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan. Namun demikian dalam pelaksanaan belum diterapkan secara keseluruhan, mengingat aturan pelaksanaannya belum ada, sehingga dalam penerapan dan pelaksanaannya akan di lakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pelaksanaan reformasi keuangan daerah telah didorong untuk lebih meningkatkan kualitas sistem dan mekanisme keuangan. Oleh karena itu ada sejumlah perundang-undangan yang telah diterbitkan yang

Kurun 3 tahun terakhir telah terbit beberapa perundangan yang berdampak pada perubahan sistem dan mekanisme keuangan daerah

Perundang-undangan keuangan yang ditetapkan

berkaitan dengan keuangan daerah. Adapun beberapa perundang-undangan tersebut terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Keuangan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan telah diterbitkan sejumlah perundang-undangan tersebut, sebagai dampaknya di tahun 2006 ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan dihadapkan pada masa transisi pelaksanaan sistem dan mekanisme yang baru. Hal ini disamping belum adanya peraturan pelaksanaannya, juga belum dimulainya sistem yang baru tersebut di Tahun 2006 ini sebagaimana ditentukan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk didalamnya adalah mekanisme Perhitungan APBD Kabupaten Lamongan Tahun

Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Lamongan dihadapkan pada masa transisi pelaksanaan sistem dan mekanisme yang baru

Anggaran 2005. Beberapa segi mekanisme perhitungan APBD Tahun 2005, materinya masih disesuaikan dengan perundang-undangan yang terdahulu, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, namun dalam pelaksanaan pengujian materi Perhitungan APBD, sudah dilakukan audit terlebih dahulu oleh BPK – RI sebagaimana ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Oleh karena itulah pelaksanaan Perhitungan APBD Tahun 2005 berada dalam masa transisional karena meleburkan beberapa segi didalam sistem penerapannya.

Keseluruhan perundang-undangan tersebut dalam pelaksanaannya mengarah pada satu tujuan, yakni pelaksanaan sistem dan mekanisme keuangan daerah harus dapat dilakukan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Lamongan akan melakukan secara bertahap dan berkesinambungan seiring dengan program Pemerintah dalam mengembangkan reformasi sistem keuangan negara.

Perhitungan APBD sebagai salah satu mekanisme

Keseluruhan perundang-undangan tersebut dalam pelaksanaannya mengarah pada satu tujuan, yakni pelaksanaan sistem dan mekanisme keuangan daerah harus dapat dilakukan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel

Laporan Perhitungan APBD disusun sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003

tahunan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan entitas Satuan Unit Kerja di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa : "Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan tahun anggaran berakhir setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan".

Dari amanah Undang-Undang dimaksud nyata sekali bahwa Laporan Perhitungan APBD yang disampaikan kepada DPRD harus terlebih dahulu dilakukan audit oleh BPK dengan harapan bahwa pelaksanaan keuangan yang akan dipertanggungjawabkan akan lebih memiliki nilai akuntabilitas dan transparan. Dalam rangka itulah maka pada tanggal 12 April 2006, BPK - RI telah melakukan audit atas Rancangan Laporan Keuangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2005, dan berakhir pada tanggal 12 Mei 2006.

Pelaksanaan audit BPK-RI

Dari hasil audit yang telah dikemukakan oleh BPK yang diwujudkan melalui Manajemen Letter atas Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2005, Rancangan Laporan Perhitungan APBD telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan temuan dalam merumuskan beberapa kebijakan akuntansi yang selama ini telah diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Lamongan, sehingga hal tersebut merupakan wahana dalam merefleksikan pelaksanaan jalannya Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan selama kurun waktu 2005.

Dalam Manajemen Letter yang merupakan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI, temuan-temuan tersebut ada yang mempengaruhi penyajian Laporan Keuangan baik disisi neraca, laporan aliran kas dan laporan perhitungan, juga temuan yang tidak mempengaruhi laporan keuangan. Terhadap temuan yang mempengaruhi laporan keuangan, telah dilakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan BPK-RI sejauhmana temuan tersebut sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan.

*Manajemen Letter
merupakan Laporan hasil
Pemeriksaan*

Setelah dilakukan konfirmasi dan konsolidasi data, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan penyesuaian terhadap Laporan Keuangan APBD Tahun 2005, yang merupakan bahan Raperda Perhitungan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2005.

Laporan Perhitungan APBD 2005 secara keseluruhan menggambarkan tentang kinerja dari realisasi atas pelaksanaan APBD 2005 dan perubahan APBD 2005. APBD Kabupaten Lamongan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004. Sedangkan Perubahan APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005, yang secara nominal Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. 435.463.414.125,00, Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp. 462.154.283.651,00 sehingga defisit yang terjadi sebesar Rp. 26.666.369.526,00 dari defisit tersebut, kebijakan penerimaan Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp. 32.945.321.190,40 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 6.278.951.664,40,00

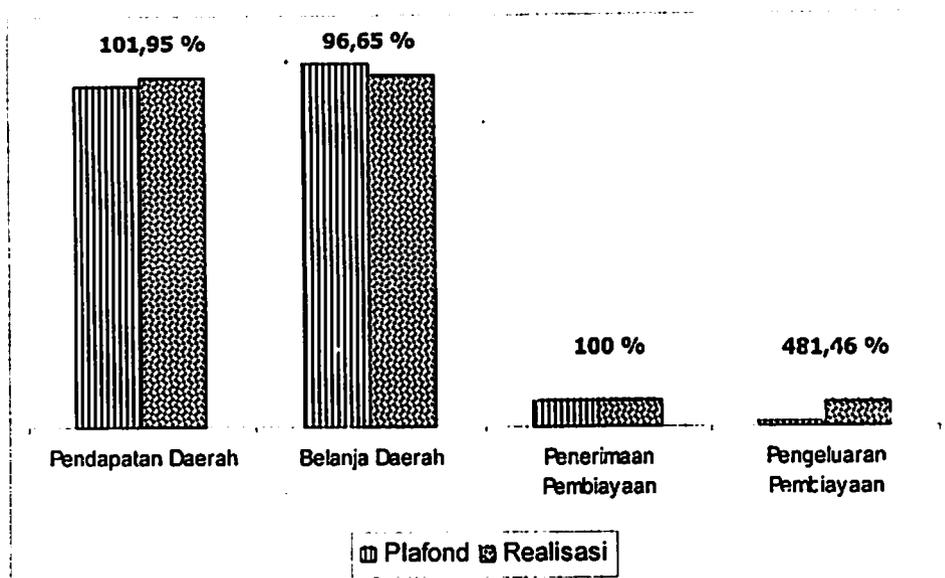
*APBD Tahun Anggaran
2005, dan Perubahan
APBD Tahun Anggaran
2005*

Dari alokasi tersebut, dalam perjalanannya tentu

*Tingkat Realisasi APBD
Tahun 2005*

mengalami tingkat realisasi yang berbeda-beda dalam setiap item komponen. Untuk itu dalam dokumen Nota Perhitungan APBD dijelaskan masing-masing komponen, baik disisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Sedangkan tingkat realisasi dari masing-masing item komponen dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 1
Realisasi Pelaksanaan APBD 2005



Dari grafik 1 diatas, secara keseluruhan realisasi APBD menunjukkan kinerja yang baik. Untuk Pendapatan Daerah menunjukkan realisasi sebesar 101,95 %, Belanja Daerah terealisasi sebesar 96,65 %, Penerimaan Pembiayaan teralisasi 100 %

*Gambaran realisasi APBD
Tahun 2005*

dan Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar 481,46 %.

Dengan tingkat kinerja tersebut, disamping menunjukkan kinerja yang diinginkan juga menunjukkan perkembangan ekonomi baik ditingkat masyarakat maupun tingkat ekonomi nasional.

Kinerja realisasi keuangan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah dan nasional.

Dari tingkat Makro ekonomi Nasional, dalam perkembangannya telah mengalami tingkat yang sangat fluktuatif. Pada semester terakhir tahun 2005, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kenaikan BBM sekitar 100 %. Dampak yang ditimbulkan tidak saja inflansi yang segera melambung mencapai tingkat diatas 2 digit, namun secara perlahan pula inflansi mengalami penurunan dan mengalami stabilitas pada tingkat 6 %.

Gambaran perekonomian nasional

Namun demikian perkembangan ekonomi juga menunjukkan hal yang positif. Kurs Rupiah pada perkembangan terakhir mengalami penguatan yang mencapai tingkat Rp. 9.300 per 1 US Dollar Amerika. Perkembangan tersebut dipicu oleh menguatnya beberapa mata uang Asia seperti yen

jepang, sehingga berdampak pula pada Rupiah. Perkembangan kurs ini diharapkan mempengaruhi penurunan inflasi akibat kenaikan BBM.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN NOTA PERHITUNGAN APBD 2005

Maksud dan tujuan penyusunan Nota Perhitungan APBD ini adalah untuk :

*Maksud dan tujuan
penulisan Nota Keuangan*

1. Memberikan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan selama periode tahun anggaran 2005 ;
2. Merupakan penjabaran singkat terhadap kebijakan arah dan kebijakan pembangunan selama kurun tahun 2005 ;
3. Menjelaskan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan ;
4. Memberikan gambaran terhadap perkembangan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan dan hak Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Merupakan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah.

1.3. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN NOTA PERHITUNGAN APBD 2005

Didalam penyusunan Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2005 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

*Landasan Hukum
Penyusunan Nota
Keuangan*

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun

- 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 2851) ;
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2024) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000

- tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penetapan APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2005 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2005.
21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 34 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN NOTA PERHITUNGAN APBD

Penyusunan Nota Perhitungan APBD merupakan penjelasan secara kualitatif dan kuantitatif yang memaparkan arah dan kebijakan umum dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2005. Adapun kerangka penulisannya disusun sebagai berikut :

*Sistematika penulisan
Nota Perhitungan APBD*

1. Bab I memuat penjelasan umum mengenai hal-hal penting atau isue – isue strategis dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2005, antara lain mengenai perkembangan ekonomi nasional dan daerah serta dasar penyusunan APBD yakni tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan nilai tukar rupiah.
2. Bab II memuat ringkasan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang disajikan dalam jumlah relatif atau perbandingan (dalam bentuk prosentase) dan memuat posisi dana cadangan daerah pada akhir tahun anggaran.
3. Bab III memuat ringkasan dan penjelasan realisasi Belanja Daerah
4. Bab IV memuat ringkasan dan penjelasan realisasi pembiayaan daerah
5. Bab V memuat uraian penutup

BAB II

REALISASI PENDAPATAN DAERAH

APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2005 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 juncto Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 dimana pada sisi Pendapatan Daerah dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 435.463.414.125,00 telah terealisasi sebesar Rp. 443.956.394.219,37 sehingga terjadi pelampauan dari target sebesar Rp. 8.492.980.094,37 atau tercapai sebesar 101,95 persen.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2005 sebesar Rp. 443.956.394.219,37

Dengan tingkat kinerja realisasi total Pendapatan Daerah selama periode Tahun Anggaran 2005 tersebut, pada komponen Pendapatan Asli Daerah telah mencapai tingkat realisasi sebesar 101,02 persen. Begitu juga komponen dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah mencapai tingkat kinerja yang diharapkan.

Hampir secara keseluruhan komponen Pendapatan telah melampaui dari target

Untuk melihat gambaran secara keseluruhan dari komponen Pendapatan Daerah dapat dikemukakan melalui tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1
Realisasi Komponen Pendapatan Daerah
Tahun 2005

No	Komponen Pendapatan	APBD 2005		persen
		Target	Realisasi	
1	Pendapatan Asli Daerah	40.936.961.485,00	41.353.905.714,37	101,02 %
2	Dana Perimbangan	369.043.562.640,00	377.119.598.505,00	102,19 %
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	25.482.890.000,00	25.482.890.000,00	100 %
	Jumlah Pendapatan Daerah	435.463.414.125,00	443.956.394.219,37	101,95 %

Untuk mengetahui seluruh komponen Pendapatan Daerah secara rinci diuraikan sebagai berikut :

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Dari ketetapan sebesar Rp. 40.936.961.485,00 telah terealisasi sebesar Rp. 41.353.905.714,37 sehingga melebihi dari target sebesar Rp. 416.944.229,37 atau tercapai sebesar 101,02 persen sebagaimana yang tertera dalam Tabel 2 dibawah ini :

PAD terealisasi sebesar 101,02 %

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005

No.	Komponen PAD	APBD 2005		persen
		Target	Realisasi	
1	Pajak Daerah	10.353.415.000,00	10.359.189.127,00	100,06 %
2	Retribusi Daerah	12.292.923.600,00	13.452.167.363,00	109,43 %
3	Bagian Laba BUMD	5.538.702.500,00	5.740.702.526,71	103,65 %
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	12.751.920.385,00	11.801.846.697,66	92,55 %
	Jumlah PAD	40.936.961.485,00	41.353.905.714,37	101,02 %

Dari tingkat realisasi sebagaimana yang tertera pada Tabel 2 diatas, nampak hampir secara

keseluruhan komponen Pendapatan Asli Daerah tercapai realisasinya, kecuali pada komponen Lain-Lain PAD Yang Sah. Komponen ini disamping memiliki tingkat Hetrogenitasnya yang sangat beragam, juga memiliki tingkat ketidak stabilan didalam realisasinya karena tergantung dari kebijakan pembangunan daerah, oleh karena itu seringkali realisasi Lai-Lain PAD Yang Sah tidak memenuhi target .

Adapun penjelasan secara rinci terhadap pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Dari bagian Pajak Daerah yang ditetapkan sebesar Rp. 10.353.415.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 10.359.189.127,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 5.774.127,00 atau tercapai sebesar 100,06 persen.

*Pajak Daerah terealisasi
100,06 %*

Dari masing-masing realisasi Pajak Daerah dijabarkan sebagai berikut :

Pajak Hotel, dari ketetapan sebesar Rp. 10.000.000,00 telah terealisasi Rp.10.935.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 935.000,00

*Pajak Hctel terealisasi
109,35 %*

atau tercapai sebesar 109,35 persen.

Pencapaian realisasi tersebut diperoleh melalui peningkatan dan sosialisasi kepada wajib pajak disertai pendekatan yang persuasif.

Pajak Restoran, dari Ketetapan sebesar Rp. 40.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 42.115.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 2.115.000,00 atau tercapai sebesar 105,29 persen.

*Pajak restoran terealisasi
105,29 %*

Pencapaian realisasi tersebut dilakukan melalui peningkatan kepada kesadaran para wajib pajak dengan pendekatan yang persuasif dan sosialisasi yang intensif. Pencapaian realisasi ini juga dipengaruhi oleh semakin meningkatnya pertumbuhan objek pajak akibat kebijakan pembangunan fasilitas perdagangan di Kabupaten Lamongan khususnya di Kota Lamongan.

Pajak Hiburan, dari ketetapan sebesar Rp. 85.500.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 88.786.525,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 3.286.525,00 atau tercapai sebesar 103,84 persen.

*Pajak Hiburan terealisasi
103,84 %*

Tingkat realisasi tersebut dicapai melalui sosialisasi

kepada objek pajak yang semakin menunjukkan perkembangan sehingga diharapkan tingkat kesadaran dalam membayar pajak juga semakin meningkat.

Pajak Reklame, dari ketetapan sebesar Rp.200.375.000,00 telah terealisasi Rp. 214.358.750,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 13.983,750,00 atau tercapai sebesar 106,98 persen.

*Pajak Reklame terealisasi
106,98 %*

Pencapaian realisasi ini disamping menunjukkan kondisi dunia usaha yang semakin membaik juga merupakan hasil dari upaya intensifikasi melalui penjaringan obyek dan subyek dalam rangka peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah.

Pajak Penerangan Jalan, dari ketetapan Rp. 9.800.000.000,00 telah terealisasi Rp. 9.783.301.627,00 sehingga mengalami penurunan dari target sebesar Rp. 16.698.373,00 atau tercapai sebesar 99,83 persen.

PPJ terealisasi 99,83 %

Tidak tercapainya target Pajak penerangan jalan ini karena adanya kebijakan Pemerintah tentang

kampanye pemakaian hemat energi listrik dan adanya pemadaman listrik bergilir oleh PLN.

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dari ketetapan sebesar Rp.150.040.000,00 telah terealisasi Rp. 151.891.025,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp.1.851.025,00 atau tercapai sebesar 101,23 persen.

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C terealisasi 101,23 %

Berlebihnya penerimaan Pajak ini merupakan hasil intensifikasi yang dilakukan aparat pemungut yang didukung pula oleh kesadaran para wajib pajak.

Pajak Pengambilan Sarang Burung, dari ketetapan sebesar Rp. 50.000.000,00 telah terealisasi Rp.50.301.200,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 301.200,00 atau tercapai sebesar 100,60 persen.

Pajak Pengambilan Sarang Burung terealisasi 100,60 %

Dengan makin lebih diintensifkan penyuluhan mendorong kesadaran kepada para obyek pajak Pengambilan Sarang Burung memiliki kesadaran terhadap kewajibannya. Tercapainya realisasi ini juga dilakukan seiring dengan dilakukan peningkatan operasional pemungutan pada wajib pajak.

Pajak Parkir, dari ketetapan sebesar Rp.17.500.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 17.500.000,00, sehingga sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pajak Parkir terealisasi sebesar 100,00 %

Pencapaian realisasi ini akan semakin ditingkatkan mengingat masih rendahnya wajib pajak dalam membayar kewajibannya, sehingga diharapkan dimasa mendatang dapat ditingkatkan kontribusinya.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran 2005 ditetapkan sebesar Rp. 12.292.923.600,00 telah terealisasi Rp. 13.452.167.363,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 1.159.243.763,00 atau tercapai sebesar 109,43 persen.

Retribusi Daerah terealisasi 109,43 %

Dari masing-masing realisasi Retribusi Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

Retribusi Pelayanan Kesehatan, dari ketetapan sebesar Rp. 3.988.500.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 4.598.341.840,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar

Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi 115,29 %

Rp. 609.841.840,00 atau tercapai sebesar 115,29 persen.

Dari pencapaian tersebut, Retribusi Pelayanan Kesehatan dihasilkan dari RSUD dengan realisasi mencapai sebesar Rp. 2.958.645.360,00 sedangkan Dinas Kesehatan realisasinya mencapai sebesar Rp. 1.156.158.940,00.

Pencapaian realisasi tersebut karena meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menambah sejumlah peralatan dan laboratorium baik di Rumah Sakit Daerah Dr. Soegiri maupun di Puskesmas-Puskesmas, sehingga secara kuantitas dapat meningkatkan jumlah layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah.

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan, dari ketetapan sebesar Rp. 100.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,00 sehingga mengalami pencapaian target atau tercapai sebesar 100,00 persen.

*Retribusi Pelayanan
Persampahan / Kebersihan,
teralisasi 100,00 %*

Tercapainya realisasi ini disebabkan adanya kesadaran pada wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya serta intensifikasi melalui penyuluhan kepada wajib retribusi khususnya para pedagang di Pasar.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, dari ketetapan sebesar Rp. 1.557.760.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.767.616.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 189.856.000,00 atau tercapai sebesar 112,03 persen.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP terealisasi 112,03 %

Tercapainya realisasi ini seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki surat – surat kependudukan dan adanya pencairan dana BLT, dimana KTP menjadi persyaratannya, serta pembuatan KTP tahun 2002 telah habis masa berlakunya pada tahun 2005.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil, dari ketetapan sebesar Rp. 245.248.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 292.079.500,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 46.831.500,00 atau tercapai sebesar 119,10 persen.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Catatan Sipil terealisasi 119,10 %

Tercapainya realisasi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kelahiran bayi dan meningkatnya kesadaran masyarakat serta adanya kegiatan jemput bola pelayanan Akta Catatan Sipil.

Retribusi Pelayanan Parkir Kawasan Pasar, dari

Retribusi Parkir Kawasan Pasar terealisasi 100,00 %

ketetapan sebesar Rp. 156.400.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 156.400.000,00 sehingga mengalami pencapaian target atau tercapai sebesar 100,00 persen.

Tercapainya realisasi ini dilakukan pemungutan secara intensif guna menghindari dampak adanya pelaksanaan Parkir Berlangganan dengan melalui penjaringan pada kendaraan yang belum memiliki tanda parkir berlangganan dan kendaraan luar Kabupaten Lamongan.

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dari ketetapan sebesar Rp. 2.040.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 2.048.704.950,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 8.704.950,00 atau tercapai sebesar 100,43 persen.

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi 100,43 %

Secara keseluruhan hasil dari Retribusi ini merupakan hasil kerjasama pengelolaan parkir dengan pihak ketiga disamping adanya intensifikasi dari petugas lapangan dalam menjaring kendaraan yang belum memiliki kartu berlangganan serta kendaraan luar Kabupaten Lamongan.

Retribusi Pelayanan Pasar, dari ketetapan sebesar

Retribusi Pasar terealisasi 100,00 %

Rp. 156.400.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 156.400.000,00 sehingga mengalami pencapaian target atau tercapai sebesar 100,00 persen.

Tercapainya realisasi penerimaan ini menunjukkan kondisi ekonomi ditingkat masyarakat menunjukkan adanya peningkatan yang semakin menggembirakan walaupun secara keseluruhan hal tersebut tidak bisa dijadikan acuan bagi indikator perbaikan ekonomi, namun setidaknya memberikan gambaran yang lebih realistis kondisi ekonomi ditingkat mikro yang terlihat dari tingkat kegiatan Pasar yang merupakan pusat pergerakan ekonomi masyarakat.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dari ketentuan sebesar Rp. 340.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 340.550.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 550.000,00 atau tercapai sebesar 100,16 persen.

Pencapaian realisasi tersebut didukung dengan adanya kegiatan operasi penertiban surat-surat yang dilaksanakan secara gabungan serta meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang

*Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor 100,16
%*

semakin mantap.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dari ketetapan sebesar Rp. 11.500.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 11.510.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 10.000,00 atau tercapai sebesar 100,09 persen.

*Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran
terealisasi 100,09 %*

Pencapaian realisasi penerimaan ini diupayakan melalui intensifikasi pemungutan khususnya ditujukan kepada Kantor – Kantor Pemerintahan dan perusahaan – perusahaan di Kabupaten Lamongan.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dari ketetapan sebesar Rp. 801.947.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 673.573.727,00 sehingga kurang dari target sebesar Rp. 128.373.273,00 atau tercapai sebesar 83,99 persen.

*Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah terealisasi
83,99 %*

Tidak tercapainya realisasi dari komponen ini, disebabkan tidak disetorkannya secara keseluruhan penerimaan sewa tanah eks benkok Kelurahan dan belum masuknya sewa tanah Solo Valey di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong oleh pihak penyewa yaitu PT. Utama Prima Jakarta dan

haltersebut akan diselesaikan pembayarannya dalam Tahun Anggaran 2006.

Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan, dari ketetapan sebesar Rp. 360.500.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 360.500.000,00 sehingga tercapai sebesar 100,00 persen.

Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan terealisasi 100,00 %

Tercapainya target penerimaan ini disebabkan naiknya tingkat hasil penangkapan ikan oleh Nelayan. Kenaikan ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengkaji lebih jauh terhadap faktor-faktor terjadinya permasalahannya, seperti adanya faktor cuaca, rusaknya habitat ikan, jumlah kapal yang beroperasi, harga BBM maupun jumlah nelayan di Kabupaten Lamongan.

Retribusi Terminal, dari ketetapan sebesar Rp. 118.728.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 118.728.900,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 900,00 atau tercapai sebesar 100,00 persen.

Retribusi Terminal terealisasi 100,00 %

Tercapainya target penerimaan retribusi terminal ini disebabkan adanya operasional bus yang cukup stabil serta adanya upaya penjangkaran yang intensif pada wajib retribusi.

Retribusi Tempat Khusus Parkir, dari ketetapan sebesar Rp. 94.290.600,00 telah terealisasi sebesar Rp. 94.698.750,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 408.150,00 atau tercapai sebesar 100,43 persen.

Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi 100,43 %

Tercapainya realisasi ini karena adanya intensifikasi penarikan dari petugas lapangan dan pengawasan yang semakin intensif di beberapa objek retribusi.

Retribusi Rumah Potong Hewan, dari ketetapan sebesar Rp. 45.300.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 45.300.000,00 sehingga mengalami pencapaian target atau tercapai sebesar 100,00 persen.

Retribusi Rumah Potong Hewan terealisasi 100,00 %

Tercapainya realisasi penerimaan ini disebabkan adanya pengawasan yang intensif terhadap pemotongan hewan baik yang dilakukan didalam RPH maupun diluar RPH.

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, dari ketetapan sebesar Rp. 40.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,00 sehingga mengalami pencapaian target atau tercapai sebesar 100,00 persen.

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan terealisasi 100,00 %

Tercapainya realisasi ini disebabkan oleh

intensifikasi dan pengetatan terhadap pemungutan retribusi disamping juga untuk menanggulangi dan mempersempit epidemi penyakit hewan yang terjadi di daerah lainnya. Hal ini dilakukan karena isu penyebaran penyakit hewan sangat intens sampai saat ini, sehingga memerlukan pemantauan dan pengetatan hewan yang ada di Pasar Hewan di Kabupaten Lamongan.

Retribusi Tempat Rekreasi, dari ketetapan sebesar Rp.370.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.370.232.850,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 232.850,00 atau tercapai sebesar 100,06 persen.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga terealisasi 100,06 %

Tercapainya realisasi ini menunjukkan peranan sektor wisata yang semakin mantap dalam perannya di Kabupaten Lamongan. Untuk itu dalam sektor wisata perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas jumlah tempat wisata dan rekreasi.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dari ketetapan sebesar Rp. 315.750.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 396.955.300,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 81.205.300,00 atau tercapai sebesar 125,72

Retribusi IMB terealisasi 125,72 %

persen.

Berlebihnya penerimaan ini merupakan hasil upaya intensifikasi melalui penjaringan dan penyuluhan pada wajib retribusi, juga merupakan kontribusi penerimaan IMB dari WBL (Wisata Bahari Lamongan).

Retribusi Izin Gangguan, dari ketetapan sebesar Rp.82.500.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 147.883.950,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 65.383.950,00 atau tercapai sebesar 179,25 persen.

*Retribusi Izin Gangguan
terealisasi 179,25 %*

Berlebihnya penerimaan ini merupakan hasil upaya intensifikasi melalui penjaringan dan penyuluhan kepada wajib retribusi.

Retribusi Izin Trayek, dari ketetapan sebesar Rp.17.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.17.078.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 78.000,00 atau tercapai sebesar 100,46 persen.

*Retribusi Izin Trayek
terealisasi 100,46 %*

Berlebihnya realisasi penerimaan ini karena didukung adanya kegiatan operasi penertiban surat-surat kendaraan yang dilakukan secara gabungan dengan instansi terkait.

Retribusi Ijin Usaha, dari ketetapan sebesar Rp.199.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.205.337.500,00 sehingga terjadi pelampauan target sebesar Rp. 6.337.500,00 atau tercapai sebesar 103,18 persen.

Retribusi Ijin Usaha Jasa terealisasi 103,18 %

Pencapaian realisasi ini dilakukan dengan melalui peningkatan pelayanan dengan Pelayanan Satu Atap.

Retribusi Izin Penebangan kayu dan Tata Usaha Kayu Rakyat, dari ketetapan sebesar Rp. 40.000.000,00 teralisasi sebesar Rp. 56.741.481,00 melampaui dari target sebesar Rp. 16.741.481,00 atau tercapai sebesar 141,85 persen.

Retribusi Izin Penebangan Kayu dan Tata Usaha Kayu Rakyat terealisasi sebesar 141,85 %

Pencapaian ini karena adanya kesadaran wajib retribusi dan intensifikasi para pemungut.

Retribusi Pas kecil dan Sertifikasi Penyempurnaan Kapal, dari ketetapan sebesar Rp. 5.500.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 5.625.000,00 sehingga mengalami pelampauan target sebesar Rp. 125.000,00 atau tercapai sebesar 102,27 persen.

Retribusi pas kecil dan sertifikasi penyempurnaan kapal terealisasi 102,27 %

Retribusi Penggantian biaya penggandaan dokumen lelang, dari ketetapan sebesar Rp. 125.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 210.057.615,00 sehingga mengalami pelampauan target sebesar Rp. 85.057.615,00 atau tercapai sebesar 168,05 persen.

*Retribusi Penggantian biaya
penggandaan dokumen
lelang terealisasi 168,05 %*

Tercapainya realisasi ini disebabkan semakin banyaknya kegiatan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2005 yang dilakukan secara kontraktual.

Retribusi ijin eksplorasi, eksploitasi dan pengambilan ABT dari ketetapan sebesar Rp. 2.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 2.300.000,00 sehingga mengalami pelampauan target sebesar Rp. 300.000,00 atau tercapai sebesar 115,00 persen.

*Retribusi ijin eksplorasi,
eksploitasi dan pengambilan
ABT terealisasi 115,00 %*

Tercapainya realisasi ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan ABT khususnya pada area perumahan dan perusahaan.

Retribusi Reklamasi, dari ketetapan sebesar Rp. 3.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 138.000.000,00 sehingga mengalami

*Retribusi Reklamasi
teralisasi 4600,00 %*

pelampauan target sebesar Rp. 135.000.000,00 atau tercapai sebesar 4.600,00 persen.

Tercapainya realisasi ini disebabkan karena adanya kegiatan Proyek Lamongan Integrated Shorebase (LIS) di Kecamatan Paciran

Retribusi ijin usaha perikanan, dari ketetapan sebesar Rp. 10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,00 sehingga mengalami pencapaian target atau tercapai sebesar 100,00 persen.

Retribusi ijin usaha perikanan terealisasi sebesar 100 %

Tercapainya realisasi ini disebabkan oleh upaya sosialisasi yang diadakan telah diakomodir oleh masyarakat nelayan dan dalam upaya ini Pemerintah berusaha untuk selalu meningkatkan usaha perikanan sebagai salah satu upaya untuk mendorong peningkatan masyarakat.

3. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah

Untuk komponen ini dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 5.538.702.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 5.740.702.526,71 sehingga tercapai 103,65 persen.

Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah terealisasi sebesar 103,65 %

Ada 5 komponen dari jenis penerimaan ini yakni :

1) Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar terealisasi

sebesar Rp. 352.380.000,00 sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- 2) Perusahaan Daerah Aneka Usaha Lamongan Jaya teralisasi sebesar Rp. 155.000.000,00 sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- 3) Bank Jatim dari ketetapan sebesar Rp. 491.322.500,00 telah terealisasi sebesar Rp. 491.322.526,71 sehingga melebihi Rp.26,71 atau tercapai 100,00 persen. Pencapaian realisasi ini didasarkan dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank JATIM Tutup Buku Tahun 2004.
- 4) PT Wisata Bahari Lamongan (WBL) dari ketetapan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 4.500.000.000,00 sehingga melebihi Rp. 500.000.000,00 atau tercapai 112,50%.
Kelebihan tersebut karena adanya bagi hasil laba Tahun 2004 yang disetor dalam Tahun 2005 sebesar Rp.450.000.000,00
- 5) Pabrik Es PT. Tirta Maharani dari ketetapan sebesar Rp. 540.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 242.000.000,00 sehingga kurang

dari target sebesar Rp. 298.0000.000,00 atau tercapai sebesar 44,81 %.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

*Lain-Lain PAD Yang Sah
terrealisasi 92,55 %*

Penerimaan dari komponen ini dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 12.751.920.385,00 telah terealisasi sebesar Rp. 11.801.846.697,66 sehingga kurang dari target sebesar Rp. 950.073.687,34 atau tercapai sebesar 92,55 persen.

Dari masing-masing komponennya dapat dirinci sebagai berikut :

Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, dari ketetapan sebesar Rp. 30.350.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 58.846.000,00 sehingga mengalami pelampauan dari target sebesar Rp. 28.496.000,00 atau tercapai 193,89 persen.

*Hasil penjualan aset daerah
terrealisasi 193,89 %*

Pencapaian ini yang terbesar berasal dari penjualan bekas bangunan Gedung Garuda Lamongan.

Jasa Giro, dari ketetapan sebesar Rp. 400.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.439.937.897,07 sehingga melebihi dari target

*Jasa Giro terealisasi
109,98 %*

sebesar Rp. 39.937.897,07 atau tercapai sebesar 109,98 persen.

Tercapainya realisasi ini disebabkan adanya kenaikan tingkat Suku Bunga Bank Indonesia sehingga mempengaruhi tingkat kenaikan penerimaan ini.

Penerimaan Bunga Deposito, dari ketetapan sebesar Rp. 1.050.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 1.094.511.997,99 sehingga terjadi pelampauan target sebesar Rp. 44.511.997,99 atau tercapai sebesar 104,24 persen.

*Penerimaan Bunga Deposito
terealisasi 104,24 %*

Pengaruh terealisasinya Penerimaan Bunga Deposito memiliki kesamaan faktor dengan Penerimaan Jasa giro yang diakibatkan dari kenaikan tingkat Suku Bunga.

Penerimaan Usaha Dinas, dari ketetapan sebesar Rp. 8.576.037.185,00 telah terealisasi sebesar Rp. 7.643.288.385,00 sehingga kurang dari target sebesar Rp. 932.748.800,00 atau tercapai sebesar 89,12 persen.

*Penerimaan Usaha Dinas
terealisasi 89,12 %*

Tidak tercapainya realisasi Usaha Dinas sebagian besar berasal dari sektor peternakan, dan dari modal usaha pabrik Pupuk Maharani akibat dari

molornya pembayaran dari pihak peternak dan manajemen pabrik pupuk, sehingga realisasinya belum dapat masuk secara keseluruhan, dan kekurangannya akan diselesaikan pada tahun 2006.

Penerimaan Lain-Lain, dari ketetapan sebesar Rp. 2.695.533.200,00 telah terealisasi sebesar Rp. 2.565.262.417,60 sehingga kurang dari target sebesar Rp. 130.270.782,40 atau tercapai sebesar 95,17 persen.

*Penerimaan Lain-Lain
teralisasi 95,17 %*

Tidak tercapainya realisasi ini berasal dari target penerimaan ASPELA, Pabrik Es Trita Maharani dan angsuran pinjaman dari beberapa Pasar Desa yang belum membayar sesuai dengan besarnya jadwal angsuran.

Tidak tercapainya realisasi ini berasal dari target penerimaan pengelolaan Pabrik Es, yang disebabkan oleh :

1. Tingginya biaya rekening listrik setiap bulan
2. Kualitas produksi belum maksimal sehingga harga jual rendah

b. DANA PERIMBANGAN

Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Tahun Anggaran 2005 dari Penerimaan Dana Perimbangan

*Dana Perimbangan
teralisasi 102,19 %*

secara keseluruhan dari target sebesar Rp. 369.043.562.640,00 telah terealisasi sebesar Rp. 377.119.598.505,00 sehingga melampaui dari target sebesar Rp. 8.076.035.865,00 atau tercapai sebesar 102,19 persen sebagaimana tertera pada Tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3
Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2005

No.	Komponen Dana Perimbangan	APBD 2005		persen
		Target	Realisasi	
1	Bagi Hasil Pajak	23.693.824.000,00	23.855.308.927,00	121,78 %
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	1.330.950.640,00	717.191.087,00	53,89 %
3	Dana Alokasi Umum	324.917.000.000,00	324.917.000.000,00	100,00 %
4	Dan Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00 %
5	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	19.101.788.000,00	22.630.098.491,00	118,47%
	Jumlah Dana Perimbangan	369.043.562.640,00	377.119.598.505,00	102,19 %

Tercapainya realisasi tersebut disamping menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang semakin membaik, juga ditopang oleh upaya – upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mengintensifikasi pemungutan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.

Sedangkan untuk realisasi Dana Alokasi Umum yang merupakan komponen utama menunjukkan realisasi yang konsisten ketetapanannya.

Untuk Dana Perimbangan dari Propinsi juga semakin menunjukkan realisasi yang semakin baik,

*Kinerja Keuangan
Pemerintah mendorong
pencapaian realisasi yang
semakin membaik*

dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 19.101.788.000,00 telah tercapai realisasi sebesar Rp. 22.630.098.491,00 sehingga melampaui dari target sebesar Rp. 3.528.310.491,00 atau tercapai sebesar 118,47 persen.

c. LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH

Dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 25.482.890.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 25.482.890.000,00 sehingga terjadi pencapaian target atau tercapai sebesar 100,00 persen. Target ini sesuai dengan ketetapan dari Pemerintah

Lain-Lain Penerimaan Yang Sah terealisasi 100,00 %

BAB III REALISASI BELANJA DAERAH

Pada sisi Belanja Daerah secara keseluruhan didalam Tahun Anggaran 2005 dialokasikan sebesar Rp. 462.129.783.651,00 pada pelaksanaannya telah terealisasi sebesar Rp. 446.670.852.065,34 sehingga terdapat sisa dana Rp. 15.458.931.585,66 atau tercapai sebesar 96,65 persen sebagaimana yang tertera pada Tabel 4 dibawah ini :

*Belanja Daerah terealisasi
96,65 %*

**Tabel 4
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2005**

No.	Uraian Belanja Daerah	APBD 2005		persen
		Alokasi	Realisasi	
A	<u>Belanja Aparatur</u>	<u>106.304.476.251,00</u>	<u>102.954.890.044,00</u>	96,75 %
1	Belanja Administrasi Umum	86.735.022.251,00	83.920.415.382,00	96,67 %
2	Belanja Operasi dan pemeliharaan	13.002.372.600,00	12.615.424.202,00	97,02 %
3	Belanja Modal	6.567.081.400,00	6.419.050.450,00	97,75 %
B	<u>Belanja Pelayanan Publik</u>	<u>355.825.307.400,00</u>	<u>343.715.962.021,34</u>	96,60 %
1	Belanja Administrasi Umum	202.251.710.000,00	193.648.181.940,00	95,75 %
2	Belanja Operasi dan pemeliharaan	32.769.647.000,00	32.492.566.283,00	99,15 %
3	Belanja Modal	35.816.835.000,00	35.214.718.200,00	98,28 %
4	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	84.087.115.400,00	82.360.495.598,34	97,95 %
5	Belanja Tidak Tersangka	900.000.000,00	-	0,00 %
	Jumlah Belanja Daerah	462.129.783.651,00	446.670.852.065,34	96,65 %

Dari realisasi secara keseluruhan tersebut untuk masing-masing realisasi komponen Belanja Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Aparatur Daerah

Dari kelompok Belanja Aparatur Daerah yang dialokasikan sebesar Rp. 106.304.476.251,00 telah terealisasi sebesar Rp. 102.954.890.044,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 3.349.586.207,00 atau tercapai 96,85 persen sebagaimana tertera pada tabel 5 dibawah ini :

Belanja Aparatur Daerah terealisasi 96,85 %

Tabel 5
Realisasi Belanja Aparatur Daerah

N o.	Uraian Belanja Aparatur Daerah	APBD 2005		persen
		Alokasi	Realisasi	
a	<u>Belanja Administrasi Umum</u>	<u>86.735.022.251,00</u>	<u>83.920.415.392,00</u>	<u>96,75 %</u>
1	Belanja Pegawai / Personalia	72.664.272.751,00	70.247.761.842,00	96,67 %
2	Belanja Barang dan Jasa	8.803.564.000,00	8.493.651.665,00	96,48 %
3	Belanja Perjalanan Dinas	1.423.979.500,00	1.358.275.000,00	96,09 %
4	Belanja Pemeliharaan	3.843.206.000,00	3.810.726.885,00	99,15 %
b	<u>Belanja Operasi dan pemeliharaan</u>	<u>13.002.372.600,00</u>	<u>12.615.424.202,00</u>	<u>97,02 %</u>
1	Belanja Pegawai / Personalia	3.227.035.500,00	3.081.126.250,00	95,48 %
2	Belanja Barang dan Jasa	6.898.444.200,00	6.663.570.652,00	96,60 %
3	Belanja Perjalanan Dinas	2.698.536.500,00	2.693.263.500,00	99,80 %
4	Belanja Pemeliharaan	178.356.400,00	177.463.800,00	99,50 %
c	<u>Belanja Modal</u>	<u>6.567.081.400,00</u>	<u>6.419.050.450,00</u>	<u>97,75 %</u>
	Jumlah Belanja Daerah	106.304.476.251,00	102.954.890.044,00	96,85 %

Dari kelompok Belanja Aparatur Daerah diuraikan menjadi beberapa bagian belanja yakni :

Belanja Administrasi Umum pada kelompok Belanja Aparatur yang dialokasikan sebesar Rp. 86.735.022.251,00 terealisasi sebesar Rp. 83.920.415.392,00 sehingga terdapat sisa dana

Belanja Administrasi Umum terealisasi 96,75 %

sebesar Rp. 2.814.606.859,00 atau tercapai realisasi sebesar 96,85 persen. Sisa lebih belanja ini sebagian besar berasal dari Belanja pegawai yang disesuaikan dengan jumlah pembayaran gaji pegawai selama kurun Tahun 2005.

Belanja Operasi dan Pemeliharaan pada kelompok Belanja Aparatur yang dialokasikan sebesar Rp. 13.002.372.600,00 terealisasi sebesar Rp. 12.615.424.202,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 386.948.398,00 atau tercapai realisasi sebesar 97,02 persen. Sisa lebih belanja ini merupakan sisa anggaran kegiatan aparatur yang tidak dipergunakan dengan menyesuaikan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

*Belanja Operasional dan
Pemeliharaan terealisasi
97,02 %*

Belanja Modal pada kelompok Belanja Aparatur yang dialokasikan sebesar Rp. 6.567.081.400,00 terealisasi sebesar Rp. 6.419.050.450,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 148.030.950,00 atau tercapai realisasi sebesar 97,75 persen. Sisa lebih belanja ini merupakan penyesuaian dari kebutuhan belanja yang disesuaikan dengan harga yang berlaku atau harga pasar dari ketetapan yang dianggarkan, serta menyesuaikan dengan besarnya kontrak pekerjaan.

*Belanja Modal terealisasi
97,75 %*

b. Belanja Pelayanan Publik

Dari kelompok Belanja Pelayanan Publik yang dialokasikan sebesar Rp. 355.825.307.400,00 telah terealisasi sebesar Rp. 343.715.962.021,34 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 12.109.345.378,66 atau tercapai sebesar 98,60 persen sebagaimana yang tertera dalam Tabel 6 dibawah ini :

Belanja Pelayanan Publik terealisasi 98,60 %

Tabel 6
Realisasi Belanja Pelayanan Publik

No	Uraian Belanja Pelayanan Publik	APBD 2005		persen
		Alokasi	Realisasi	
a	<u>Belanja Administrasi Umum</u>	<u>202.251.710.000,00</u>	<u>193.648.181.940,00</u>	<u>95,75 %</u>
1	Belanja Pegawai / Personalia	186.065.426.000,00	177.618.606.727,00	95,46 %
2	Belanja Barang dan Jasa	13.560.742.000,00	13.412.256.001,00	98,91 %
3	Belanja Perjalanan Dinas	365.067.000,00	363.199.850,00	99,49 %
4	Belanja Pemeliharaan	2.260.475.000,00	2.254.119.362,00	99,72 %
B	<u>Belanja Operasi dan pemeliharaan</u>	<u>32.769.647.000,00</u>	<u>32.492.566.283,00</u>	<u>99,15 %</u>
1	Belanja Pegawai / Personalia	1.405.152.050,00	1.383.569.550,00	98,46 %
2	Belanja Barang dan Jasa	16.683.940.950,00	16.610.707.783,00	99,56 %
3	Belanja Perjalanan Dinas	471.568.000,00	471.119.950,00	99,90 %
4	Belanja Pemeliharaan	14.208.986.000,00	14.027.169.000,00	98,72 %
C	<u>Belanja Modal</u>	<u>35.816.835.000,00</u>	<u>35.214.718.200,00</u>	<u>98,32 %</u>
D	<u>Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan</u>	<u>84.087.115.400,00</u>	<u>82.350.495.598,34</u>	<u>97,95 %</u>
	Jumlah Belanja Pelayanan Publik	355.825.307.400,00	343.715.962.021,34	96,60 %

Dari Kelompok Belanja Pelayanan Publik diuraikan menjadi beberapa bagian belanja yakni :

Belanja Administrasi Umum pada kelompok Belanja Pelayanan Publik dialokasikan Rp. 202.251.710.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 193.648.181.940,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 8.603.528.060,00 atau tercapai

Belanja Administrasi Umum terealisasi 95,75 %

realisasi sebesar 95,75 persen.

Belanja Operasi dan Pemeliharaan pada kelompok Belanja Pelayanan Publik dialokasikan sebesar Rp. 32.769.647.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 32.492.566.283,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 277.080.717,00 atau tercapai realisasi sebesar 99,15 persen.

Belanja Operasional dan Pemeliharaan terealisasi 99,15 %

Belanja Modal pada kelompok Belanja Pelayanan Publik dialokasikan sebesar Rp.35.816.835.000,00 telah terealisasi sebesar Rp. 35.214.718.200,00 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 602.116.800,00 atau tercapai realisasi sebesar 98,32 persen.

Belanja Modal terealisasi 98,32 %

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar Rp. 84.087.115.400,00 telah terealisasi sebesar Rp. 82.360.495.598,34 sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 1.726.619.801,66 atau tercapai realisasi 97,95 persen.

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan terealisasi 97,95 %

Belanja Tidak Tersangka dialokasikan sebesar Rp. 900.000.000,00 tidak terealisasi sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp. 900.000.000,00 atau tercapai realisasi sebesar 0,00 persen.

Belanja Tidak Tersangka terealisasi 0,00 %

BAB IV

REALISASI PEMBIAYAAN

Komponen pembiayaan merupakan kelompok *Pembiayaan merupakan sarana kebijakan fiskal* anggaran yang merupakan sarana kebijakan pemerintah dalam menyikapi fiskal yang terjadi. Dalam perjalanan anggaran maka realisasi dari pembiayaan dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini :

Tabel 7
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2005

No.	Uraian Pembiayaan Daerah	APBD 2005		persen
		Target	Realisasi	
A	<u>Penerimaan Daerah</u>	<u>32.945.321.190,40</u>	<u>32.945.321.190,40</u>	<u>100,00 %</u>
1	SILPA Tahun Lalu	32.945.321.190,40	32.945.321.190,40	0,00 %
2	Transfer dari Dana Cadangan	0	0	0
B	<u>Pengeluaran Daerah</u>	<u>6.278.951.664,40</u>	<u>30.230.863.344,43</u>	<u>481,46 %</u>
1	Transfer ke Dana Cadangan	0	0	0,00 %
2	Penyertaan Modal	5.516.537.809,24	5.516.181.911,75	99,99 %
3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	41.583.200,00	41.583.200,00	100,00 %
4	SILPA tahun berjalan	720.830.655,16	24.673.098.232,68	3422,87 %
	Jumlah Pembiayaan Daerah	26.666.369.526,00	2.714.457.845,97	10,18 %

Dari masing-masing komponen dapat diuraikan sebagai berikut :

Penerimaan pembiayaan yang alokasinya dari Sisa *Penerimaan Pembiayaan terealisasi 100 %* Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu yang dialokasikan Rp. 32.945.321.190,40 terealisasi

sebesar Rp. 32.945.321.190,40. Pencapaian realisasi ini merupakan penyesuaian dari ketetapan sisa lebih perhitungan Tahun 2004 sesuai dengan ketetapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2004.

Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan yang secara keseluruhan dialokasikan sebesar Rp. 6.278.951.664,40 telah terealisasi sebesar Rp. 30.230.863.344,43 dengan rincian sebagai berikut :

*Pengeluaran
teralisasi 481,46 %* *Pembiayaan*

- a. Penyertaan modal sebesar Rp. 5.516.181.911,75
- b. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo Rp. 41.583.200,00
- c. Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun berjalan sebesar Rp. 24.673.098.232,68 yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2005.

BAB V

PENUTUP

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun dalam rangka untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Agar lebih transparan dan akuntabel, maka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 telah disusun beberapa dokumen yakni :

1. Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2005
2. Nota Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2005
3. Laporan Neraca
4. Laporan Aliran Kas

Penyusunan dokumen tersebut dikarenakan bahwa Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 masih menggunakan ketentuan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, sehingga untuk menghadapi transisi perubahan sistem dan mekanisme keuangan sebagaimana diamanahkan didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem keuangan negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah belum sepenuhnya diterapkan. Untuk mengakomodir beberapa perubahan

Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun dalam rangka menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas.

tersebut, maka pada bagian tertentu Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2005 dikonversi dari format lama menjadi format baru.

APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2005 secara garis besar telah terealisasi dengan uraian sebagai berikut : (i) Pendapatan Daerah teralisasi sebesar Rp. 443.956.394.219,37, (ii) Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp. 446.670.852.065,34 sehingga terjadi (iii) defisit anggaran sebesar Rp. 2.714.457.845,97,00

Realisasi APBD Tahun 2005

Desifit tersebut akan dibiayai dari sumber penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 32.945.321.190,40, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk : (i) Penyertaan Modal sebesar Rp. 5.516.181.911,75,00 (ii) Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo sebesar Rp. 41.583.200,00 dan (iii) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan sebesar Rp. 24.673.098.232,68,00

Realisasi Pembiayaan tahun 2005